



# Nasionalis Sekuler

## Menentang Penerapan Syari'at Islam

Pihak-pihak yang merasa gerah oleh upaya pelaksanaan Syari'ah Islam dalam berbangsa dan bernegara, selalu mempertalikan dalihnya kepada, "kepentingan nasional lah," "agama adalah masalah pribadi lah," "tidak membumi," "tidak kontekstual," dan lain-lain. Sesungguhnya mereka gagal memahami agama dan memahami Syari'ah Islam. Mereka menilai, penerapan Syari'ah Islam adalah sebuah kemustahilan.

**B**agi para pemimpin sekuler nasionalis, pemberlakuan syariat Islam secara nasional adalah sebuah kemustahilan sehingga tidaklah kontekstual untuk menganalisisnya sebagai bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan untuk memperdebat-kannya sekalipun.

Kehidupan beragama seharusnya tidak diatur melalui kewenangan negara, kendati rakyat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. "Kalau itu dicampur maka akan merusak semangat konstitusi kita," kata politisi senior mantan pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dr. Dimiyati Hartono.

Pandangan Dimiyati ini seakan mewakili sikap umumnya para politisi nasionalis sekuler yang hampir setiap saat senantiasa alergi untuk membicarakan Syari'at Islam, apalagi jika itu diletakkan dalam konteks kehidupan nasional.

Mereka berpandangan bahwa Syari'at Islam tidak perlu diundangkan secara nasional karena dikhawatirkan akan mengganggu harmoni dan kemajemukan masyarakat Indonesia yang memang terdiri dari berbagai komponen meliputi suku, tradisi dan agama.

Mereka khawatir mengundang-undang penerapan syariah Islam secara nasional akan menghilangkan identitas nasional, menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik, dan mengkhianati cita-cita para pemimpin bangsa.

Bagi mereka Indonesia adalah wadah bagi keberagaman sebuah masyarakat yang sangat mejemuk sehingga undang-undang atau hukum yang dibuat seharusnya mencirikan kemajemukan atau menghormati keberagaman itu, bukan dengan menonjolkan kepentingan sebuah kelompok tertentu, meski mereka adalah kelompok mayoritas di negeri ini.

Sekilas pandangan mereka tampak sebagai seorang demokrat egalitarian yang sangat peduli pada pluralitas masyarakat dan berkepentingan untuk menjaganya dari kemungkinan tirani mayoritas. Namun jika direnungkan kembali, sikap mereka juga kadang dilandasi ketakutan tidak berdasar, generalisasi yang salah atas efek syariat Islam terhadap kehidupan negara yang kemajemukan masyarakatnya tinggi, dan pemahaman yang keliru tentang syariat Islam.



## KAJIAN UTAMA

### Fait a Compli

Mereka senantiasa untuk menyatakan sebuah kesimpulan dari sebenarnya masih dan belum berlaku (*fait a compli*) bahwa penerapan syariat Islam tidak akan efektif sepanjang masyarakat muslim Indonesia tidak peduli pada agamanya dan tidak mempraktikkan kehidupan Islami.

“Saya mendukung kalau syariat Islam diterapkan oleh individu-individu muslim, tetapi saya menolak kalau negara harus intervensi terlalu jauh agar Syari’at Islam dilaksanakan oleh masyarakat kita,” kata Dimiyati.

Menurutnya, mengundang-undangan Syari’at Islam secara nasional akan membangkitkan kekhawatiran dan ketakutan para pemeluk agama selain Islam. “Mereka akan menjadi gelisah dan takut hak-hak mereka terganggu yang kemudian mendorong mereka bereaksi lebih keras hingga lalu mengancam stabilitas dan keutuhan negara Indonesia.”

Lontaran pernyataan Dimiyati ini bukan sesuatu yang baru karena hal ini sudah berulang kali disampaikan oleh tokoh-tokoh nasionalis sekuler sebelum Dimiyati dan sudah menjadi sikap umum tokoh-tokoh kalangan itu. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah pernyataan tersebut didorong oleh mispersepsi dan bekal yang tidak terlalu cukup untuk mengerti secara benar apa itu Syari’at Islam.

Beberapa negara yang menerapkan hukum Islam, seperti Malaysia dan Maroko, ternyata mereka tidak mengalami kesulitan dan tidak harus dihadapkan pada ancaman destabilisasi sosial atau politik.

Malaysia yang kurang lebih hanya 50 persen penduduk muslimnya bisa menerapkan syariah Islam secara efektif tanpa mengganggu komunitas beragama lainnya, bahkan mereka hidup berdampingan, sangat jarang bersikutan, apalagi terlibat kerusuhan sosial diantara pemeluk agama.

Bahkan di Maroko yang mayoritas

penduduk beragama Islamnya lebih dari 80 persen, pemerintah membuka partisipasi luas kalangan umat beragama lain berkiprah di sektor kehidupan nasional mana saja. Di negeri ini, bahkan ada menteri yang keturunan dan beragama Yahudi, belum lagi para penasehat raja yang juga tidak melulu berasal dari kalangan beragama Islam.

Kedua negara muslim yang menerapkan hukum Islam ini ternyata menjadi salah satu negara paling tertib dan bebas dari gejolak sosial di kawasannya meski hukum mereka bercirikan pada satu identitas agama saja, padahal masyarakatnya juga tidak kalah majemuk dari Indonesia.

### Tidak mampu

Indonesia yang lebih dari 80 persen penduduknya beragama Islam ternyata tidak mampu melakukan hal yang telah dilakukan oleh Malaysia yang penduduk beragama Islamnya kurang dari 60 persen dari total populasi penduduk.

Meski ada contoh sukses di Malaysia dan beberapa negara muslim lainnya di beberapa kawasan seperti Maroko, para pemimpin bangsa ini enggan menyetujui formula negara berpedomankan pada Syari’at Islam karena mereka khawatir itu akan memicu perpecahan nasional, sesuatu yang tidak terjadi di Malaysia.

“Tolong jangan bandingkan dengan Malaysia karena setiap negeri memiliki kekhasan budaya, tradisi dan sejarahnya masing-masing. Syari’at Islam mungkin cocok diterapkan di Malaysia, namun belum tentu efektif di Indonesia,” kata Dimiyati yang menjadi Ketua Umum Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) itu.

Dimiyati mengingatkan bahwa sejarah perjuangan berbangsa Malaysia dan Indonesia sungguh berbeda dan itu mempengaruhi setiap langkah dan pertimbangan yang harus dibuat oleh para pemimpin dan masyarakat di kedua bangsa.

**Sayang, argumen-argumen yang dilontarkan para pemimpin nasionalis-sekuler seringkali hanya taklid buta, persepsi yang salah, kecurigaan yang tidak berdasar, dan ketakutan yang sebenarnya dibangun oleh persepsi salah dan kecurigaan serta generalisasi yang keliru atas Syari'at Islam.**

Dimiyati mengutarakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh satu elemen bangsa saja, namun juga melibatkan semua anggota masyarakat tanpa melihat identitas suku, etnis, budaya dan agamanya.

"Sehingga ketika kita harus membuat peraturan dan menjalankan kehidupan nasional maka itu harus bisa mempertimbangkan kepentingan, sumbangsih dan perlindungan kepada semua lapisan dan anggota masyarakat, bukan hanya untuk satu golongan atau satu pemeluk agama saja," cetusnya.

Dia, sebagaimana umumnya sikap kalangan nasionalis sekuler, tegas menyatakan bahwa penerapan Syari'at Islam dalam kehidupan nasional adalah hal yang membahayakan integritas nasional. Oleh karena itu, ia yakin penerapan Syari'at Islam akan tidak efektif karena berpotensi menimbulkan keributan nasional dan perpecahan nasional.

"Masyarakatlah yang seharusnya pengatur dari berlakunya Syari'at Islam, bukan negara." Demikian Dimiyati.

Sayang Dimiyati seperti menutup mata dari keberhasilan yang telah dicapai beberapa negara muslim dalam menerapkan Syari'at Is-

lam. Ia juga tidak menjelaskan pada bagian mana, Syari'at Islam akan membahayakan kehidupan nasional. Malaysia telah memberikan contoh sebuah bangsa yang tertib, tahu aturan, makmur dan bebas dari pergolakan meski mereka menerapkan hukum yang bercirikan satu agama saja, Syari'at Islam.

Sayang, argumen-argumen yang dilontarkan para pemimpin nasionalis sekuler seringkali hanya taklid buta, persepsi yang salah, kecurigaan yang tidak berdasar, dan ketakutan yang sebenarnya dibangun oleh persepsi salah dan kecurigaan serta generalisasi yang keliru atas Syari'at Islam. Lebih parah lagi mereka enggan membahas pemberlakuan Syari'at Islam karena mereka sudah tercekoki persepsi bahwa Syari'at Islam itu keras dan menafikan keberbedaan, sesuatu yang tak pernah terjadi di Malaysia dan Maroko. Bahkan di Iran, kaum beragama lain bisa hidup lebih terjamin dibanding kaum muslim Iran sendiri.

Dan seperti halnya, impian sebagian besar masyarakat muslim untuk menjadikan Islam sebagai spirit nasional dan panduan kehidupan bernegara disaat moralitas bangsa yang sedang dekaden seperti sekarang ini, akan terus terhambat oleh pandangan keliru dari tokoh-tokoh nasionalis sekuler. JS/TR